

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk memperkaya masyarakat adalah pembangunan. Berbagai kegiatan pembangunan nasional ditujukan untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah yang masih cenderung memiliki pendapatan yang lemah (Hendriyani, 2017). Oktari dkk., (2014) menyatakan bahwa faktor keuangan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk berorganisasi. Ciri utama kemandirian daerah dapat dilihat pada keuangan daerah. Kapasitas kabupaten untuk mengawasi dana teritorial menyiratkan bahwa lokal independen seharusnya mempunyai kekuatan serta kapasitas buat menyelidiki sumber keuangan mereka dan menghimpun dana dengan mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri yang sesuai. Kontrol pemerintah daerah (Rani, 2016).

Menurut Halim (2007:112), dukungan untuk bantuan fokus harus dibatasi, sehingga pendapatan terdekat yang didukung oleh strategi keseimbangan moneter fokal dan provinsi, harus menjadi sumber pembiayaan terbesar. Idealnya, semua biaya daerah bisa ditutupi dengan pendapatan daerah, sehingga kabupaten benar-benar mandiri dan bebas dari pemerintah pusat (Sanga dkk., 2018).

Undang-Undang no. 33 Tahun 2004 merubah dari UU No. 25 Tahun 1999 tentang keserasian moneter antara pemerintahan pusat serta daerah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sumber pendapatan berasal dari pendapatan daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Lestari (2016) menyatakan bahwa kebijakan

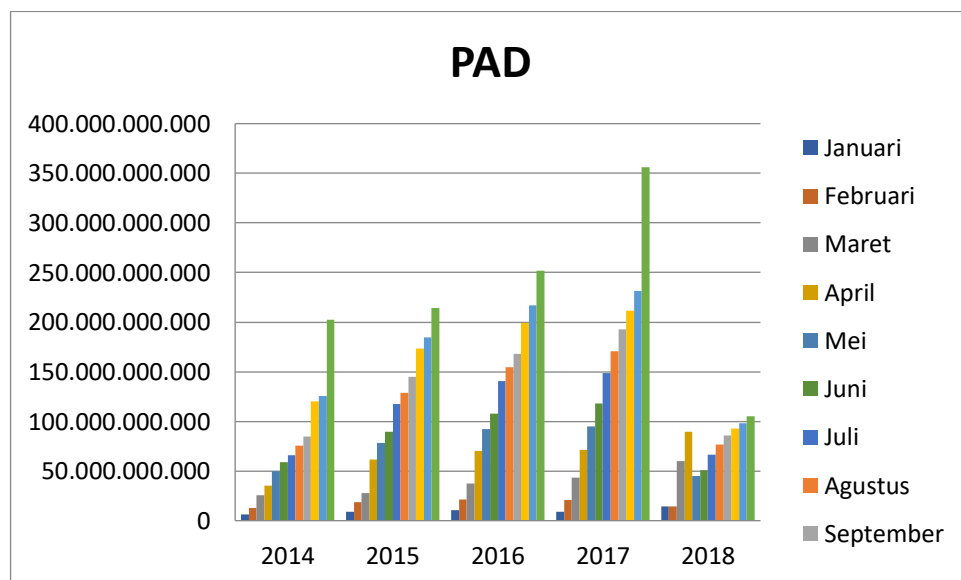
perimbangan keuangan menekankan pada empat tujuan utama. (B) Menutup lobang moneter di antara legislative pusat dan lokal dan antara administrasi negara bagian yang dijalankan. (C) Lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan administrasi publik serta mengurangi penyimpangan antara bantuan pemerintah dan administrasi public antar daerah. (D) Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah, terutama efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sumber daya keuangan.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, Pendapatan daerah digambarkan sebagai pendapatan bersumber di wilayah kemudian dipungut menurut standar setempat sesuai dengan peraturan yang ada. Sumber PAD yaitu dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, serta PAD yang sah (Ardiansyah, 2019). Optimalisasi PAD diharapkan mampu jadi penyangga untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD dapat memenuhi kebutuhan daerah, semakin tinggi derajat kemandirian daerah dan semakin otonomi daerah dalam sektor moneter (Usman, 2017). Oleh karena itu, pendapatan daerah mengambil peran yang sangat sentral dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah (Sanga dkk., 2018). Namun kondisi yang ada masih kurang memadai, yang berarti porsi PAD terhadap total pendapatan asli daerah (TPD) di daerah masih relatif rendah. (Mayza dkk., 2015).

Pendapatan di Kabupaten Purbalingga setiap bulannya terus meningkat. Tingkat kenaikannya juga sangat fluktuatif, terlihat dalam Tabel 1.1, meskipun terjadi peningkatan setiap bulannya, namun di tahun 2018 terjadi naik turun. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan kebijakan sehingga menyebabkan PAD

Kabupaten Purbalingga naik turun. Berikut ini adalah realisasi PAD di Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sampai 2018 :

Tabel 1. 1
Realisasi Perkembangan PAD di Kabupaten Purbalingga Periode 2014 – 2018 (Juta Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan (2014-2018)

Upaya yang bisa dilakukan supaya PAD meningkat yaitu sumber daya yang ada harus ditingkatkan kembali. Pendapatan asli daerah akan meningkat jika pemerintah menyadari faktor-faktor di sekitarnya. Berbagai faktor yang bisa berpengaruh terhadap PAD antara lain pajak daerah, belanja pemerintah, dan inflasi.

Pajak adalah salah satu dari beberapa sumber pendapatan lokal. Selain itu, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berimbang, dipungut sesuai dengan

peraturan yang ada, dan dipakai buat biaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 34/2000). Menurut Sanga dkk., (2018) dalam penelitian mereka mengatakan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi PAD, karena untuk membiayai rumah tangga daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah pusat menganggarkan anggaran yang besar untuk daerah. Sementara itu, penelitian dari Ramadhan (2019) menetapkan bahwa pajak daerah mempengaruhi PAD karena pernah terjadi permasalahan dalam hal kurang optimalnya kontribusi pajak daerah, sehingga sekarang pemerintah mencoba untuk lebih mengoptimalkan kontribusi pajak daerah.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah merupakan sesuatu yang mencerminkan kebijakan pemerintah. Hendriyani (2017) mengatakan bahwa dengan asumsi otoritas publik telah menetapkan strategi untuk membeli tenaga kerja dan produk, pengeluaran publik mencerminkan biaya yang perlu dikeluarkan otoritas publik buat melaksanakan pengaturan tersebut. Kontribusi pemerintah dalam pembangunan baik sebagai pendorong maupun fasilitator, memerlukan bimbingan serta fasilitas pendukung, termasuk rencana keuangan untuk pembangunan berkelanjutan (Rani, 2016). Menurut Hendriyani (2017) dalam penelitiannya dikatakan bahwa belanja publik tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah, hal ini disebabkan oleh faktor lain yaitu pajak daerah. Sedangkan penelitian Rani (2016) menyebutkan bahwa belanja pemerintah mempengaruhi pendapatan daerah karena peningkatan belanja pemerintah secara signifikan mempengaruhi peningkatan pembayaran wilayah dari biaya terdekat

melalui pengembangan sekolah, sarana dan prasarana kesehatan, sehingga belanja pemerintah memiliki berdampak positif bagi pendapatan asli daerah.

Selain pajak daerah dan belanja pemerintah, inflasi juga mempengaruhi pendapatan daerah. Dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, jika inflasi meningkat, biaya tenaga kerja dan produk meningkat, masyarakat akan lebih cenderung menabung di bank dari pada membelanjakannya untuk kebutuhan tambahan. Namun jika inflasi menurun, pemanfaatan publik akan meningkat yang secara tegas akan mempengaruhi pendapatan lokal (Lestari, 2016). Penelitian Hendriyani (2017) mengatakan inflasi tidak mempengaruhi pendapatan daerah karena biaya tenaga kerja dan produk saat inflasi naik maka, menyebabkan kemampuan pembelian individu menurun dan perusahaan tidak dapat memenuhi omzet penjualan, sehingga pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah dari pajak juga menurun. Sementara itu, menurut Lestari (2016) dalam penelitiannya, inflasi mempengaruhi pendapatan daerah karena inflasi adalah efek dari perkembangan moneter positif atau negatif.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Hendriyani (2017) yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah, antara lain belanja publik, penduduk dan inflasi, sedangkan penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah. termasuk pajak daerah, pengeluaran pemerintah dan inflasi.

Berdasarkan latar belakang, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendapatan asli daerah maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga Periode 2014 -2018)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka dapat kita rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga?
2. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga?
3. Apakah inflasi mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga?
4. Apakah pajak daerah, pengeluaran pemerintah dan inflasi mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Purbalingga.
3. Untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh terhadap terhadap pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Purbalingga.

4. Untuk menganalisis apakah pajak daerah, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Purbalingga?

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat maupun pemerintah. Adapun manfaat yang bisa diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap mampu menambah wawasan dari teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang pendapatan asli daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusa masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel pada penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan pada penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.